BAB III

ISI DARI KERJA PRAKTEK

3.1 Sejarah

Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman, dalam bentuk proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (P2KP) sudah dilaksanakan sejak tahun 1999 dan telah menghasilkan perkembangan yang positif, khususnya dalam hal mengokohkan lembaga masyarakat warga setempat, sebagai dasar bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditingkat local. Namun disadari bahwa keberhasilan tersebut belum terimbangi dalam keterlibatan berbagai pihak untuk secara terpadu berupaya menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan yang pada intinya berupaya meningkatkan sinerja antara lembaga masyarakat warga setempat dengan berbagai pelaku pembangunan lainnya; terutama pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok peduli/ahli setempat sehingga terjadi gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

P2KP tahap ke-2 berupaya menyempurnakan dan mengembangkan beberapa aspek, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, peranan sosialisasi agar menjangkau lebih luas serta lebih substantif, melalui kegiatan-kegiatan pemasyarakatan,kehumasan dan iklan di berbagai media. lebih dari itu, aspek pelatihan dan penguatan kapasitas juga menjadi fokus perhatian yang dititik beratkan

Penyempurnaan tersebut mencakup tidak saja substansi, tetapi juga format pedoman yang memilahkan antara pedoman umum, pedoman proses dan pedoman pelaku yang memberi peluang untuk tiap pelaku memfokuskan perhatian dan peran masing-masing dalam upaya bersama tersebut. Melalui penyempurnaan tersebut diharapkan juga semua pelaku P2KP tahap ke-2 memiliki komitmen, landasan berpikir dan bertindak serta orientasi yang sama.

Meskipun demikian disadari bahwa tiap pedoman selalu memiliki kelemahan dan tidak akan pernah selesai, kecuali pelaku-pelaku sendiri yang menyempurnakan dilapangan dengan seluruh jiwa P2KP, maka tiap penyempurnaan tersebut haruslah memalui koordinasi dan persetujuan PMU berdasarkan saran dari KMP,

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensial dan structural, khususnya yang berkaitan dengan dimensi-dimensi politik, sosial,dan ekonomi, serta dalam jangka panjang, mampu menyediakan asset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Kepada organisasi masyarakat warga dimaksud yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang

Diputuskan oleh masyarakat sediri melalui rembug warga, baik dalam bentuk kredit mikro (dana bergulir) maupun hubah untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses

pemberdayaan masyarakt, melalui pendampingan intensi oleh fasilitator kelurahan di tiap kelurahan peserta P2KP.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP tahap pertama cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskin. Meskipun demikian, pengalaman P2KP tahap pertama menunjukan bahwa keberhasilan P2KP untuk menumbuhkan pertisipasi dan membangun kapasitas organisasi masyarakat warga setempat, ternyata belum diimbangi dengan pengakaran kelembagaan lokal tersebut, serta belum tumbuhnya prakarsa, peran dan dukungan yang memadai dari pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok peduli/ahli lainnya (LSM, profosional, perguruan tinggi, ulama). Sehingga belum terwujud kerjasama dan dukungan serta gerakan sinergis yang optimal terhadap upaya masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa penyempurnaan yang mampu mendorong dan melembagakan peran masyarakat local dengan lebih menekankan partisipasi dan manajemen masyarakat dalam penanggulangan kemisikinan . pola tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kritis mayarakat sehingga pola pembanguanan dari, oleh dan untuk masyarakat dapat mengakar serta membudaya. Artinya, program penanggulangan kemiskinan benar-benar terwujud menjadi gerakan masyarakat. Lebih dari itu, posisi dan peran masyarakat juga diperkuat dengan membangun sinerja dan kepedulian bersama antara masyarakat dengan pemerintah

local, dunia usaha dan kelompok pemeduli (LSM, professional, universitas, ulama, dll),

Sehingga penggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab dan gerakan bersama. Penyempurnaan pola penanggulangan kemiskinan tersebut, selanjutnya diakomodasi dalam P2KP tahap kedua, melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan pelaku –pelaku pembangunan lokal lainnya. Diharapkan pengembangan proyek ini mampu melandasi tumbuh perkembangan "gerakan masyarakat" dan"gerakan kemitraan" penggulangan kemiskinan oleh masyarakat, pemerintah daerah,dunia usaha dan kelompok pemeduli lainnya.

3.2. Tujuan P2KP

Adapun tujuan P2KP ialah :

a. Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman masyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan /pengembangan perumahannya.

Mengenalkan dan membangun upaya-upya peningkatan pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan untuk msyarakat miskin perkotaan, baik masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang pendapatannya menjadi tidak berarti

b. karena inflasi, maupun masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi.
c. Terciptanya organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, akseptabel, inklusif, tanggap dan akuntabel yang mampumemberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan.

3.3. Sasaran

Adapun sasaran P2KP dapat dibagi menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat

Kelompok penerima manfaat P2KP adalah warga masyarakat miskin perkotaan , sesuai dengan ***rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga,*** termasuk di dalammnya adalah masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi, serta masyarakat yang kehilangan sumber nafkahnya dikarenakan krisis ekonomi.

b. Sasaran lokasi

Kriteria penentuan lokasi sasaran P2KP tersebut didasarkan tiga alasan penting , yaitu:

1. Kawasan tersebut yang palimh parah terkena dampak kjrisis ekonomi
2. Merupakan kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar.
    2. Secara Geografis terletak di sepanjang pantai utara pulau jawa, yang secara umum merupakan kawasan yang memiliki komunitas paling miskin dibandingkan dengan kawasan lainnya di pulau Jawa.

3.4. Strategi

Adapun strategi yang dilakukan P2KP agar tujuannya tercapai ialah melaui :

1. Mendorong tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat.

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan organisasi yang berakar dimasyarakat
3. Menjalin sinergi penaggulangan kemiskinan sebagai gerakan masyarakat

3.5. Pendekatan

Beberapa pertimbangan penerapan pendekatan bertumpu pada kelompok ialah :

1. Dalam kelompok ,warga masyarakat diharapkan dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatannya
2. Proses penampunagan dapat berjalan lebih efisien
3. Trejadi proses saling asah saling asuh antar sesama warga atau anggota

3.6. Visi dan Misi P2KP

Visi P2KP ialah mampu membangun sinergi dengan berbagi pihak lain untuk menaggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Sedangkan misinya Memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumberdaya, dan membudayakan kemitraan sinergis antara masyarakat dengan pelaku – pelaku pembangunan lokal lainnya.

Prinsip – Prinsip P2KP

1. Demokrasi
2. Partisipasi
3. Transparansi dan akuntabilitas

4. Desentralisasi

3.7. Indikator – Indikator penting

Pemahaman mendalam akan substansi dari indikator kunci, selain sangat penting bagi kepentingan proyek dalam rangka evaluasi penyempurnaan, juga terutama sangat penting bagi masyarakat untuk mengembangkan mekanisme kontrol sosial dan menilai kinerja pelaku-pelaku P2KP di wilayahnya masing-masing . Adapun indikator tersebut dapat dilihat dari **Tabel I** dan **Tabel II**

TABEL I

INDIKATOR KELUARAN/OUTPUT P2KP

Komponen	Keluaran/ output	Indikator Keluaran/Output	Sumber Informasi
1. Pengembangan masyarakat (Community Development)	a. Kepedulian Masyarakat akan kemiskinan yang ada di wilayahnya, serta bagaimana menaggulanginya b. Terbentuknya BKM c. PJM Pronangkis, termasuk rencana tahunan d. Partisifasi aktif BKM, yang berlandaskan Prinsip kerelawanan	a. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pemilihan BKM b. Pemilihan BKM secara fair melalui proses tertentu c. Jumlah dan presentase keterlibatan wanita dalam BKM d. Jumlah rembug warga yang di organisasikan oleh BKM e. PJM dan rencana Tahunan pronangkis f. Jumlah pertemuan forum BKM per tahunnya	a. Sistem Informasi Manajemen (SIM P2KP) b. SIM P2KP c. SIM P2KP d. SIM P2KP e. SIM PSKP f. SIM P2KP
2. Dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) Kelurahan	a. Terbangun mekanisme penyaluran dana yang efesien dari pemerintah ke BKM b. BKM mampu mengelola dana BLM sesuai aturan P2KP Kegiatan-kegiatan pelayanan yanag didanai merupakan	a. waktu yang dibutuhkan b. Prinsip akuntansi & Transparansi c. Jumlah proposal yang diajuklan, disetujui dan disahkan serata didanai d. Nilai dana proposal	a. sistem Informasi Manajemen (SIM P2KP) b. Lap audit c. SIM P2KP d. SIM P2KP e. SIM P2KP f. SIM P2KP g. SIM P2KP

	penjabaran atau terkait PJM pronangkis	e. Prosentase warga miskin sesuai BKKBN f. Prosentase perempuan yang menerima manfaat hibah dan pinjaman g. Tingkat kesejahteraan penerima manfaat	h. Survey dampak mid term dan aktif/lengkap

TABEL II
INDIKATOR PENCAPAIAN TUJUAN P2KP

Tujuan P2KP	Indikator pencapaian tujuan	Sumber informasi
1. memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan pemukiman masyarakat miskin perkotaan	Melembaganya suatu mekanisme peningkatan kualitas lingkungan pemukiman yang berkaitan langsung yang diukur melalui: a) % kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar perumahan b) % KK miskin yang memperoleh manfaat langsung dari dampak perbaikan atau pembangunan prasarana dan sarana	Laporan evaluasi dampak dan studi khusus
2. Mengenalkan dan membangun upaya –upaya peningkatan pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan	Melembaganya suatu mekanisme bagi upaya peningkatan pendapatkan masyarakat miskin perkotaan secara mandiri dan berkelanjutan, yang diukur melalui : a) %KSM yang mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya secara berkesinambungan b) % UPK mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin di wilayahnya	Laporan evaluasi dampak dan studi khusus
3. Membangun dan mendukung terciptanya organisasi masyarakat yang presentatif	Melembaganya suatu mekanisme yang menjalin masyarakat miskin dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka dala proses pengambilan keputusan di daerah, yang diukur	Laporan evaluasi dampak dan studi khusus

	melalui a) % rumah tangga yag dapat mengartikulasikan masalahnya b) memperbaiki efesiensi alurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	

3.8. Langkah – langkah pelaksanaan Proyek

Langkah-langkah pelaksanaan P2KP pada dasarnya terdiri dari kumpulan kegiatan-kegiatan di berbagai tataran : pusat, daerah, masyarakat yang dapat saja bersifat urutan atau bersamaan atau bahkan ada yang menerus , seperti antara lain pemantauan dan pendampingan . Di samping itu, kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilih kedalam tahap persiapan dalam arti tidak langsung terkait dengan pelaksanaan, untuk menghindarkan terjadinya anggapan yang salah mengenai kemungkinan adanya urutan baku yang menerus dari awal sampai akhir, maka dapat dilihat pada **Tabel III** dan **IV**

TABEL III
TAHAP PERSIAPAN

KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
Lokakarya P2KP untuk internal Ditjen perumahan dan permukiman Dept.kimpraswil	Penyelenggaraan : PMU Peserta : Eselon 3 dan 4 serta fungsional Ditjen perkim, Dept. kimpraswil Fasilitator : tim persiapan	Seluruh staf eselon 3 & 4 serta tenaga fungsional di Ditjen perkim memiliki pemahaman yang sama tentang P2KP	Lihat kerangka acuan lokakarya
Lokakarya orientasi P2KP tingkat pusat	Penyelenggara : Bappenas Peserta : staf proyek, PMU dan tim koordinasi Nasional P2KP Fasilitator : tim persiapan	Seluruh staf proyek, Pmu dan wakil intansi terkait dalam tim koordinasi Nasional P2KP memiliki pemahaman yang sama tentang P2KP	Lihat keterangan acuan lokakarya
Pencanangan P2KP tahap ll mulai dilaksanakan	Penyelenggara : PMU Fasilitator : Menteri pemukiman dan prasarana wilayah	Momentum P2KP tahap ll dimulai	
Lokakarya P2KP bagi	Pemyelenggaa : PMU	• konsultan pelaksana P2KP	Lihat TOR,GBPP

kosnultan Manjemen pusat	Peserta : seluruh staf KMP (team leader, Co-team leader, tanaga ahli dan lainnya). Fasilitator : tim persiapan	paham dan terjadi persamaan pemahaman mengenai P2KP • rencana tindak pelaksanaan P2KP di lapangan disetujui PMU	danmodul peltihan
Lokakarya P2KP	Pnyelenggara : KMP Peserta : seluruh staf KMW (team leader, Co-team leader, tenaga ahli dan lainnya). Fasilitator : tim persiapan dan KMP	• konsultan pelaksana P2KP paham dan terjadi persamaan pemahaman mengenai P2KP • rencana tindak pelaksanaan P2KP di lapangan disetujui KMP	Lihat TOR, GBPP dan modul pelatihan
Lokakarya orientasi P2KP tingkat nasional	Penyelenggara : PMU. Peserta : Dirjen & wakil-wakil instalasi pusat.	Eselon 1 & 2 instalasi pusat terkait, Gubernur, Ketua DPRD.	Lihat kerangka acuan lokakarya

TABEL IV
TAHAP PELAKSANAAN

No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
1	Serangkaian rembug warga untuk memutuskan berminat mengikuti P2KP, dan di tindak lanjuti dengan pemilihan kader masyarakat serta pengajuan surat permohonan bantuan teknik	Penyelenggara: lurah/kades. Peserta: ketua RW, RT,Dusun, Tokoh masyarakat, Perwakilan organisasi masyarakat setempat, dan warga miskin setempat. Fasilitator: tim Fasilitator	1) kesepakatan warga untuk menerima atau tidak melaksanakan P2KP 2) Surat pemintaan bantuan teknik ke tim koord.kota/Kabupaten 3) Warga memilih 3-5 kader yang dianggap paling dapat dipercaya serta memiliki sifat-sifat kerelawanan dan komitmen yang tinggi untuk membantu masyarakat dalam pelaksannaan P2KP di kelurahannya.	1.KMW dan ti fasilitator memfasilitasi proses rembug warga 2.Dilakukan proses silaturahmi 3.Dianjurkan agar sepertiga kader masyarakat adalah wanita
2	Pelatihan Kader Masyarakat	Pelaksana: Tim Fasilitator Pesrta: Kader-kader Masyarakat Fasilitator: Tim Fasilitator & Tim Pelatih	1) Kader masyarakat paham prinsip, nilai, substansi & mekanisme P2KP 2) Kader masyarakat paham dasar pendampingan	GBPP & modul pelatihan kader Masyarakat

3	Merefleksi masalah di kelurahan/desa masing-masing	Fasilitator	1) Kemiskinan bukan sekedar takdir tanpa ikhtiar/usaha 2) Kesadaran bahwa upaya penganggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri 3) Perumusan apa saja(sumber daya) yang di8butuhkan untuk penaggulangan kemiskinan	SebelumFGD , harus dilakukan pelatihan metoda FGD untuk kader Masyarakat dan fasilittor
4	Pemilihan utusan warga sebagi calon peserta untuk melakukan pemetaan Swadaya serta perencanaan partisipatif		Ditetapkan 25-30 orang dari kelurahan sete,patsebagi claon pelaksana	1) Kriteria paling dipercaya masyarakat & kerelawanan tinggi 2) Setengah dari kader dan utusan terpilih diutamakan wanita dan warga miskin
5	Pelatihan dasar Pemetaan Swadaya serta pembentukan Tim Pemetaan Swadaya	Pelaksana: Tim Fasilitator Peserta: Tim Pemetaan Swadaya dan Kader-kader Masyarakat Fasilitator: KMW	1) Kader Masyarakat & Tim pemetaan mampu melakukan pemetaan Swadaya 2) Tim Pemetaan Swadaya terentuk dana tersusun rencana kerja serta jadwal pelaksana yang disepakati	Pedoman Pelatiahn Pemetaan Swadaya
6	Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Swadaya oleh waraga masyarakat kelurahan sasaran	Pelaksana: kader Masyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya Peserta: sebanyak mungkin warga Fasilitator: Tim Fasilitator	1) peta dan frofil keluarga miskin(*untuk menetapkan criteria dan daftar keluarga miskin penerima P2KP)*	1) Pedoman teknik pelaksanaan pemetaan Swadaya 2) Format-format pemetaan Swadaya 3) Hasil Pemetaan Swadaya akan digunakan sebagai dasar penyusunanPJM(3tahun)

3.9. Pengelolaan keuangan proyek

3.9.1. Arus Pendanaan

Kepala PMU akan bertanggung jawab pada aktivitas tingkat pusat an PJOK akan bertanggung jawab dalam proses administrasi BLM. PJOK akan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kantor KPKPN setempat, yang selanjutnya menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada Bank Indonesia setempat, Bank Indonesia akan menyalurkan dana P2KP ke masing masing rekening BKM di Bank yang ditunjuk BKM.

3.9.2. Tata Cara Pencairan Dana

Pemerintah Indonesia Membuka rekening (RK) di Bank Indonesia dalam mata uang Dollar Amerika(USD). Seluruh salinan dokumen pencairan (Surat Perintah Membayar/SPM) ywng dikeluarkan oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKPN)akan disimpan oleh PMU, dan PJOK dan KMWsesuai dengan wilayah kerjanya

3.10. Struktur organisasi

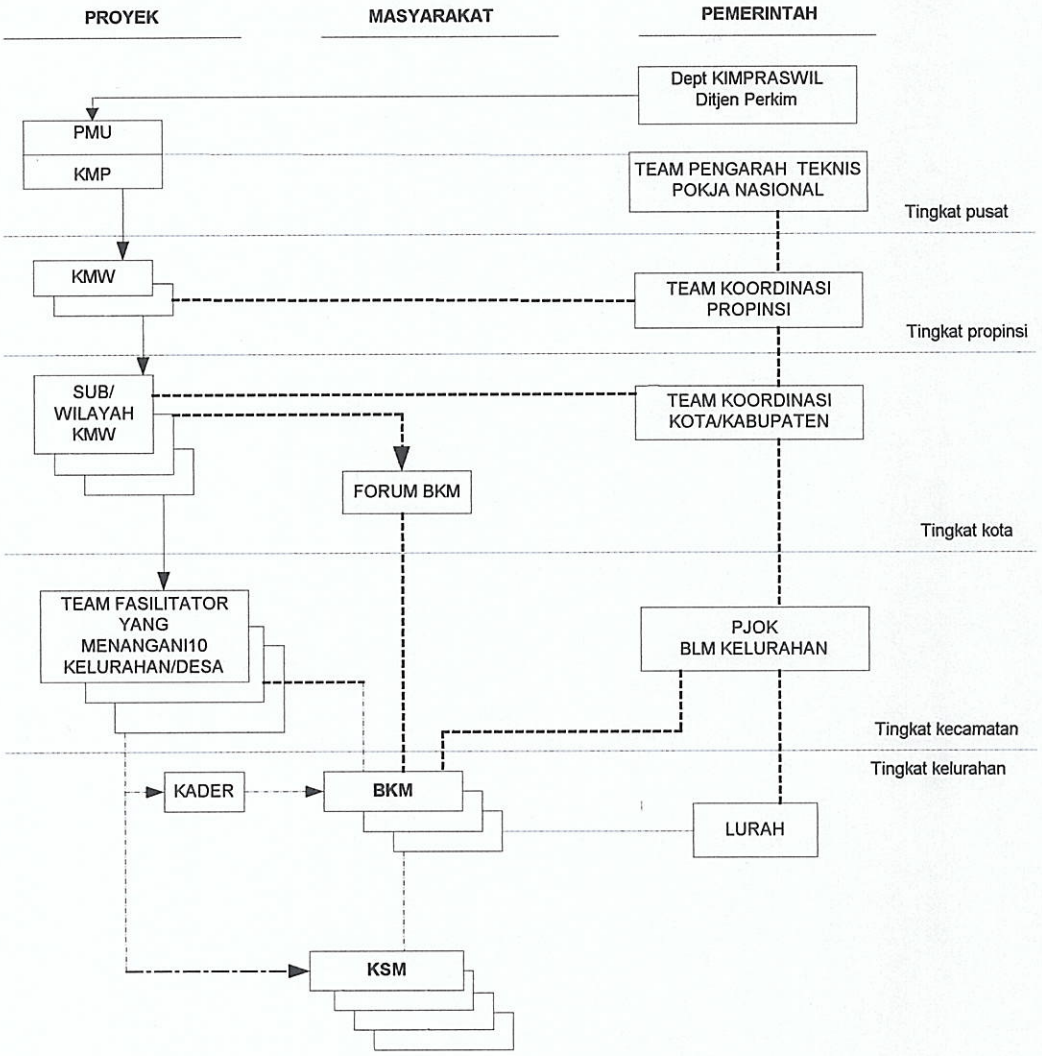
Struktur organisasi proyek menggambarkan pola penanganan proyek secara menyeluruh dari pusat sampai dengan daerah. Departemen pemukiman dan prasarana wilayah (kimpraswil) adalah lembaga penyelenggara proyek P2KP. Melalui direktoran jenderal pemukiman dan perumahaan (Ditjen Perkim) bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proyek P2KP .

Direktorat jenderal perumahan dan pemukiman Departemen kimpraswil membentuk unit manajemen proyek atau lebih dikenal dengan PMU (Proyek manajemen Unit) yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang membawahi beberapa

staf, untuk pelaksanaan lapangan PMU melalui pimpro mengontrak konsultan +manajemen pusat (KMP) yang bertindak atas nama PMU sesuai dengan kewenangan yang diberikan PMU.

Disamping itu di tiap kelurahan, warga masyarakat harus memilih tiga sampai dengan lima calon kader masyarakat yang nantinya melalui suatu pelatihan secara khusus oleh KMW akan menjadi kader P2KP yang akan berperan sebagai agen pembangunan dan bekerja sama warga sebagai relawan untuk meningkatkan kesejahteraan warga disekitarnya, secara rinci kerja secara unsure pelaksanaan proyek dari tingkat pusat sampai tingkatmasyarakat dapat dilihat dari struktur organisasi berikut ini

STRUKTUR ORGANISASI P2KP



Garis fungsional

Garis fasilitasi

Garis koordinasi

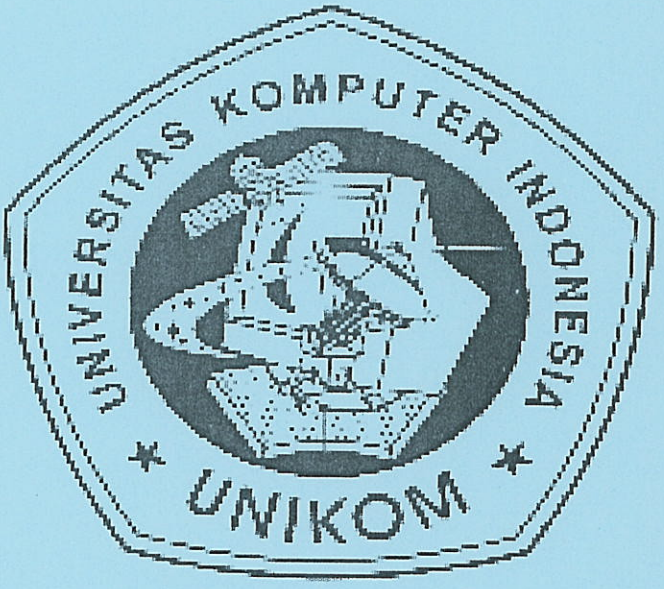
Khusus di lokasi
pilot proyek paket

Tim koordinas Nasional :terdiri dari perwakilan Bapepenas,dep keuangan, Depdagr
PJOK :Penanggung jawab OPerasional Kegiatan BLM Di tk kec
PMU :Project Manajemen Unit
KMP :Konsultan Manajemen Pusat
KMW :Konsultan Manajemen Wilayah
BKM :Badan Keswadayaan Masyarakat
UPK :Unit Pengelola UPK
KSM :Kelompok Swadaya Masyarakat
Kader :Kader Masyarakat

3.11. Aktifitas yang dilakukan selama Kerja Praktek

Aktivitas kerja Praktek antara lain :

1. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan kerja yang ada di Dinas koperasi.
2. Menyerahkan hasil kerja kepada kepala bagian yang kemudian di koreksi terlebih dahulu, jika hasilnya sesuai dengan prosedur kemudian diproses kedalam komputer.
3. Setelah diproses melalui komputer kemudian disimpan dalam bentuk file kemudian di print ulang dan di serahkan kepada kepala bagian yang bersangkutan.
4. Mendata masyarakat miskin perkotaan didampingi oleh tim pasilitator.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM